



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
Web : <http://bpbdtanjungjabungbarat.go.id> email : bpbdtanjungjabungbarat@gmail.com



RENSTRA TAHUN 2025-2029



KUALA TUNGKAL, 21 AGUSTUS 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lampiran IV : Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Renstra Perubahan ini merupakan gambaran arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan selama lima tahun ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Perubahan ini.

Akhirnya diharapkan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat dalam mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP
NIP. 19660528 199103 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
BAB II	
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas dan Fungsi, Sumber Daya OPD, Kinerja elayanan dan,	
BAB III	
Tantangan dan Peluang	11
2.2 Sumber Daya SKPD	21
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	31
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	32
3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
BAB IV	
Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi	
BAB V	
3.4 Talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	37

	Hidup Strategis	
BAB VI	38
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	
	38
	TUJUAN DAN SASARAN	
BAB VII	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD	
	44
BAB VIII	Tabel T.C-25	47
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Kebijakan	
	51
	Tabel T.C-01 Strategi BPBD	53
	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan	57
	Tabel T-C. 27.....	61
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1 Indikator Kinerja Individu	65
	PENUTUP	81

1. Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggulangan bencana yang terjadi diluar Kecamatan Tungkal Ilir terdapat hambatan – hambatan seperti jarak tempuh yang jauh, lambat informasi pengaduan kejadian diterima oleh unit siaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ketepatan mobilisasi personil dan peralatan dan perlengkapan. Bencana yang lambat ditindaklanjuti akan semakin buruk dan dampaknya juga semakin meluas.

Sampai saat ini belum didirikan unit – unit penanggulangan bencana di tiap – tiap kecamatan. Unit penanggulangan bencana kecamatan juga harus dilengkapi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan peralatan dan perlengkapan yang memadai.

2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, tidak dapat di jadikan dasar hukum dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum, diarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam peraturan daerah tersebut.

Saat ini penegakan ketentraman dan ketertiban umum hanya bersifat himbauan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada ketentuan umumnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang dimaksud, yang meliputi: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Selanjutnya secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dan mengatur urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 ayat (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.*

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bencana dan kebakaran secara implisit berada pada

pembagian urusan pemerintahan bidang *Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat* Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Adapun Sub Urusan Bencana kewenangan urusannya adalah Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terbentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab. VI Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat 2 Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomo 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana telah menyusun Rencana Strategis Perubahan 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta acuan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran jangka menengah lima tahun yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi dan inovasi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan daerah yang matang.

Renstra Perubahan SKPD atau Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra OPD Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Profinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;

25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu;

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi Jambi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencaaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.1 Tugas dan Fungsi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan dan, Tantangan dan Peluang

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai **Tugas**:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai **fungsi**:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. **Kepala Badan** yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD
2. **Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - 2) Pemantauan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. **Unsur Pelaksana**, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
- 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

2.1. Subbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD. Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
- 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
- 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
- 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Subbag Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
- 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Subbag Kepegawaian dan Umum

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;

- 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Subbid Kesiapsiagaan

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Subbid Sarana dan Prasarana

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
- 3) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Bencana dan Rehabilitasi

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;

- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Subbid Penanggulangan Bencana

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;
- 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

4.2. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

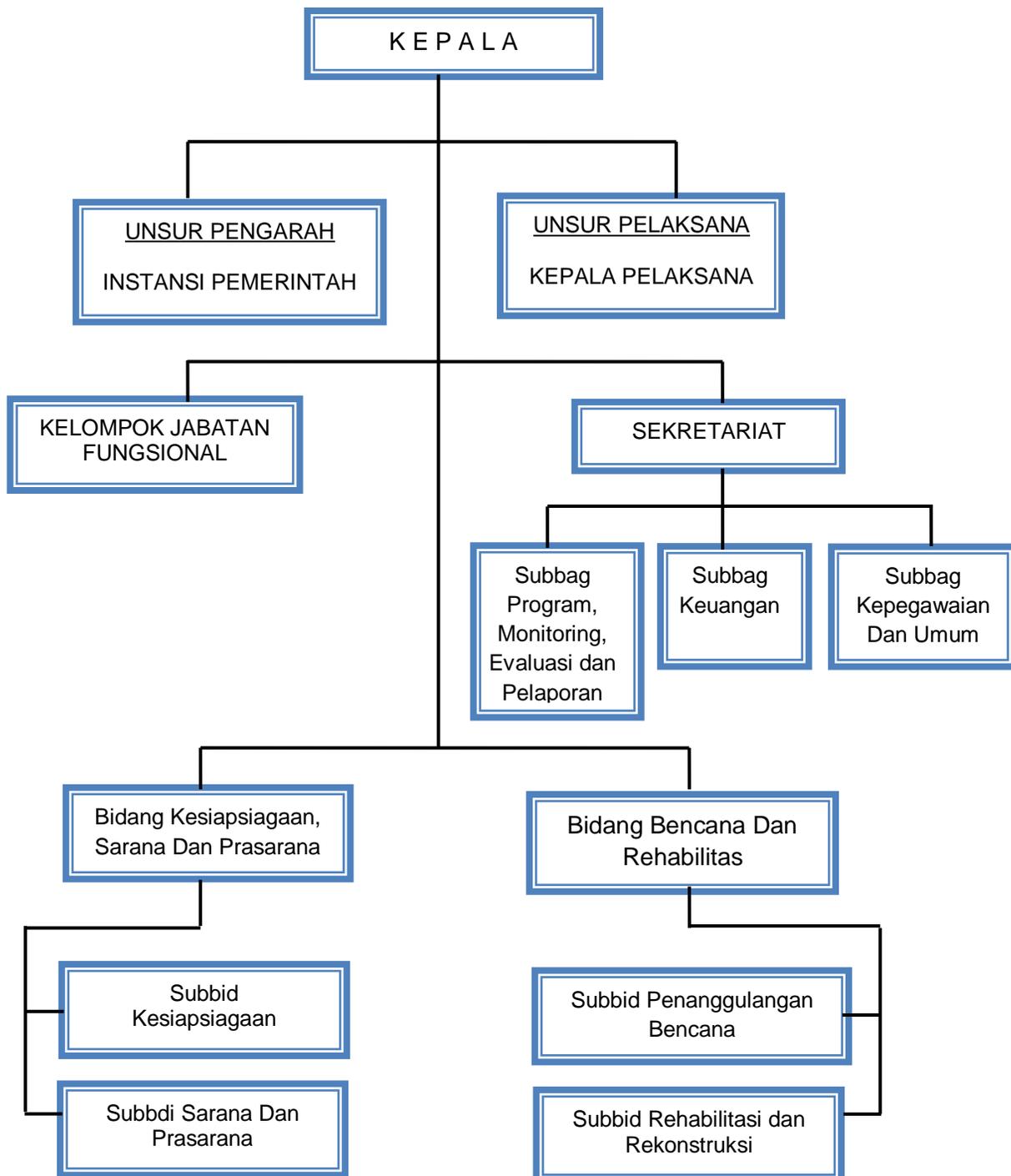
- 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan seksi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;

- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada bagan dibawah ini

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan Satgas TKS/TKK sebanyak 78 orang. Adapun susunan kepegawaian dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pangkat/Gol

No	Status Pegawai	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	3
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	3
5.	P N S	Penata	III/c	3
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	-
7.	P N S	Penata Muda	III/a	3
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	P N S	Pengatur	II/c	4
10.	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	P N S	Pengatur Muda	II/a	-
12.	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13.	P N S	Juru	I/c	-
14.	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
	Jumlah			21
15.	Honorar/TKS/TKK	-	-	14
16.	Honorar/THL/TRC	-	-	64
	Jumlah Total			99

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D 3 / Diploma 3	1
4.	SLTA / Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
	Jumlah	21

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tabel pada lampiran.

Selain itu, peralatan TRC-PB yang dimiliki BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.2.1
Daftar Peralatan TRC-PB BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)				
	a. Mobil Double cabin (Mobil Rescue)	2	Unit	1	1
	b. Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
	c. Mobil Single Cabin	1	Unit	1	
	d. Mobil Mitsubishi Triton	1	Unit	1	
	e. Mobil Mini bus Toyota rush	1	Unit	1	
	f. Mobil mini bus Toyota new rush	1	Unit	1	
2	KENDARAAN RODA 2 (Dua)				
	a. Sepeda Motor Trail	10	Unit	5	5
	b. Sepeda motor Yamaha Zupiter	2	Unit	2	
	c. Sepeda motor Yamaha Scorpio	1	Unit	1	
	e. Sepeda motor Honda vario	7	Unit	6	1
	f. Sepeda motor Yamaha RX king	1	unit		1
3	KENDARAAN RODA 3 (Tiga)				
	Viar	2	Unit	1	1
4	SPEED BOAT				
	a. Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
	b. Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
5	MESIN PEMADAM				
	a. Shibaura TF 745	2	Unit	1	1
	b. Shibaura TF 516	3	Unit	1	2
	c. Mesin Apung	2	Unit	1	1
	d. Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e. Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f. Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g. Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h. Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i. Mesin jinjing Honda GXH 50 series	4	unit	4	
	j. Wick 250	1	Unit		1
6	SELANG PEMADAM				
	a. Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b. Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11

7	NOZZLE				
a.	Nozzle L	8	Unit	6	2
b.	Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
c.	Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
d.	Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
8	ALAT KOMUNIKASI				
a.	Handy Talky	29	Unit	4	25
b.	RIG	4	Unit		4
c.	SSB	1	Unit	1	
e.	Global Positioning system	2	Unit	1	1
f.	Antenna gasden	2	Unit	2	
g.	Breket anten mobil	2	Unit	2	
h.	Radio	1	Unit	1	
i.	Radio icom	1	Unit		1
j.	Camera video phantom	2	Unit	2	
k.	Camera digital	3	Unit	1	2
l.	Handycam	1	Unit	1	
m.	Layer film proyektor	2	Unit	1	1
n.	Unit power supply	3	Unit	3	
o.	Pc.unit	7	Unit	5	2
p.	Laptop	19	Unit	5	14
q.	Printer	9	Unit	4	5
r.	scanner	1	Unit		1
9.	ALAT PENERANGAN				
a.	Solar Lampu (Lampu Penerangan)	2	Unit	2	
b.	Head lamp	3	Unit	2	1
c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
e.	Lampu tembak	2	Unit		2
f.	Lampu sirene	3	Unit	3	
10	ALAT KANTOR LAINNYA				
a.	AC. Split	6	Unit	3	3
b.	Meja	39	Unit	39	
c.	Kursi Rapat	63	Unit	63	
d.	Kursi putar Tanpa Lengan	7	Unit	3	4
e.	Kursi putar Pakai Lengan	4	Unit	4	
f.	Kursi tamu ukiran hongkong	1	Unit	1	
g.	Lemari Buku Arsip	4	Unit	4	
h.	Filling cabinet besi	2	Unit	2	
i.	Mesin absen	1	Unit	1	
j.	brandkas	2	Unit	1	1
k.	sofa	1	Unit	1	
l.	Lemari es	1	Unit	1	
m.	televisi	2	Unit	1	1
n.	dispenser	2	Unit	2	

	o.	karpets	7	Unit	5	2
	p.	Gorden kray	1	Unit	1	
	q.	Treng/ tandon air,200Lt dan 1000Lt	5	Unit	5	
10.	a.	Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"	1	Unit	1	
	b.	Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"	1	Unit	1	
11.		Embung Kapasitas 1500 liter	2	Unit	2	
12		TENDA				
	a.	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b.	Tenda Pengungsi	2	Unit	1	1
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d.	Tenda Regu	1	Unit		1
	e.	Tenda Cabin	2	Unit		2
13		PERALATAN LAINNYA				
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit	1	
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	6	Unit	4	2
	h	Staright	5	Unit	5	
	i	teropong	3	Unit	2	1
	j	Auto stop	2	Unit	2	
	k	Pulley speed	2	Unit	2	
	l	Pulley fixed	4	Unit	4	
	m	Pulley rescue	4	Unit	4	
	n	Tali karmantel static	2	Unit	2	
	o	Tali karmantel dynamic	2	Unit	2	
	p	Tali webbing roll	2	Unit	2	
	q	Tandu basket	2	Unit	2	
	r	Descender figure 8	4	Unit	4	
	s	Jumar ascender	4	Unit	4	
	t	Tangga aluminium	1	Unit		1
	u	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	v	handspayer	10	unit	10	
	w	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	x	Golok	10	Unit		10
	y	Angkong	3	Unit	1	2
	z	Alat deteksi mayat	1	Unit	1	
14		LOGISTIK				
	a	Peralatan dapur	1	Paket	1	
15		ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE				

TRC					
a.	Sarung Tangan	30	Buah		30
b.	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
d.	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
e.	Sekop Besar	10	Buah	2	8
f.	Vell Bed	50	Buah	7	43
g.	Rompi	29	Buah	29	
h.	Body hernes	6	Buah		6
i.	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
j.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
	<i>Jumlah Sarana</i>	<i>847</i>	<i>Buah</i>	<i>417</i>	<i>430</i>

Tabel. 2.2.2.2
Daftar Inventaris BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6
1	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)				
a.	Mobil Double cabin (Mobil Rescue)	2	Unit	2	
b.	Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
c.	Mobil Single Cabin	1	Unit		1
d.	Mobil Mitsubishi Triton	1	Unit	1	
e.	Mobil Mini bus Toyota rush	1	Unit	1	
f.	Mobil mini bus Toyota new rush	1	Unit	1	
2	KENDARAAN RODA 2 (Dua)				
a.	Sepeda Motor Trail	10	Unit		
b.	Sepeda motor Yamaha Zupiter	2	Unit	2	
c.	Sepeda motor Yamaha Scorpio	1	Unit	1	
e.	Sepeda motor Honda vario	7	Unit	6	1
f.	Sepeda motor Yamaha RX king	1	unit		1
3	KENDARAAN RODA 3 (Tiga)				
	Viar	2	Unit	2	
4	SPEED BOAT				
a.	Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
b.	Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
5	MESIN PEMADAM				
a.	Shibaura TF 745	2	Unit	2	
b.	Shibaura TF 516	3	Unit	2	1
c.	Mesin Apung	2	Unit	2	
d.	Tohatsu V 80	1	Unit		1
e.	Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	

	f.	Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g.	Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h.	Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i.	Mesin jinjing Honda GXH 50 series	4	unit	4	
	j.	Wick 250	1	Unit		1
6	SELANG PEMADAM					
	a.	Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b.	Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11
7	NOZZLE					
	a.	Nozzle L	8	Unit	6	2
	b.	Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c.	Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d.	Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
8	ALAT KOMUNIKASI					
	a.	Handy Talky	29	Unit	9	20
	b.	RIG	4	Unit		4
	c.	SSB	1	Unit	1	
	e.	Global Positioning system	2	Unit	1	1
	f.	Antenna gasden	2	Unit	2	
	g.	Breket anten mobil	2	Unit	2	
	h.	Radio	1	Unit		1
	i.	Radio icom	1	Unit		1
	j.	Camera video phantom	2	Unit	2	
	k.	Camera digital	3	Unit	1	2
	l.	Handycam	1	Unit	1	
	m.	Layer film proyektor	2	Unit	1	1
	n.	Unit power supply	3	Unit	3	
	o.	Pc.unit	6	Unit	5	1
	p.	Laptop	19	Unit	5	14
	q.	Printer	9	Unit	4	5
	r.	scanner	1	Unit		1
9.	ALAT PENERANGAN					
	a.	Solar Lampu (Lampu Penerangan)	2	Unit	2	
	b.	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
	e.	Lampu tembak	2	Unit		2
	f.	Lampu sirene	3	Unit	3	
10	ALAT KANTOR LAINNYA					
	a.	AC. Split	6	Unit	3	3
	b.	Meja	39	Unit	39	
	c.	Kursi Rapat	63	Unit	63	
	d.	Kursi putar Tanpa Lengan	7	Unit	3	4
	e.	Kursi putar Pakai Lengan	4	Unit	4	
	f.	Kursi tamu ukiran hongkong	1	Unit	1	

	g.	Lemari Buku Arsip	4	Unit	4	
	h.	Filling cabinet besi	2	Unit	2	
	i.	Mesin absen	1	Unit	1	
	j.	brandkas	2	Unit	1	1
	k.	sofa	1	Unit	1	
	l.	Lemari es	1	Unit	1	
	m.	televisi	2	Unit	1	1
	n.	dispenser	2	Unit	2	
	o.	karpets	7	Unit		
	p.	Gorden kray	1	Unit	1	
	q.	Treng/ tandon air	5	Unit	5	
10.	a.	Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"	1	Unit	1	
	b.	Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"	1	Unit	1	
11.		Embung Kapasitas 1500 liter	2	Unit	2	
12		TENDA				
	a.	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b.	Tenda Pengungsi	2	Unit	2	
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d.	Tenda Regu	1	Unit		1
	e.	Tenda Cabin	2	Unit		2
13		PERALATAN LAINNYA				
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit		1
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	2	Unit	2	
	h	Staright	5	Unit	5	
	i	teropong	3	Unit	2	1
	j	Auto stop	2	Unit	2	
	k	Pulley speed	2	Unit	2	
	l	Pulley fixed	4	Unit	4	
	m	Pulley rescue	4	Unit	4	
	n	Tali karmantel static	2	Unit	2	
	o	Tali karmantel dynamic	2	Unit	2	
	p	Tali webbing roll	2	Unit	2	
	q	Tandu basket	2	Unit	2	
	r	Descender figure 8	4	Unit	4	
	s	Jumar ascender	4	Unit	4	
	t	Tangga aluminium	1	Unit		1
	u	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1

	v	handspayer		unit		
	w	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	x	Golok	10	Unit	5	5
	y	Angkong	3	Unit	2	1
	z	Alat deteksi mayat	1	Unit	1	
14	LOGISTIK					
	a	Peralatan dapur	1	Paket		
15	ALAT ALAT KERJA DAN <i>PERSONAL USE</i> TRC					
	a.	Sarung Tangan	30	Buah	30	
	b.	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
	c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
	d.	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
	e.	Sekop Besar	10	Buah	2	8
	f.	Vell Bed	50	Buah	20	30
	g.	Rompi	29	Buah	29	
	h.	Body hernes	6	Buah		6
	i.	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
	j.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
		<i>Jumlah Sarana</i>	<i>847</i>	<i>Buah</i>	<i>455</i>	<i>392</i>

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Bidang Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPBD dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan mengkoordinasikan secara sistematis dan teknis keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat" bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana yang masih sulit diantisipasi
2. Pengetahuan terhadap Penanggulangan Bencana : Belum memadainya kapasitas SDM BPBD
3. Akuntabilitas : kurang yakinnya pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja BPBD

Sedangkan peluang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Informasi potensi bencana dapat diperoleh melalui informasi cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).
2. Pengetahuan :
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat dan pembekalan.
 - 2) Masyarakat peduli terhadap isu-isu bencana
 - 3) Media yang memberikan berita-berita mengenai antisipasi kebencanaan
3. Akuntabilitas :
 - 1) Dipercaya menyalurkan dan bantuan bencana
 - 2) Kinerja mulai diakui dengan pembentukan 1 pleton Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) sebanyak 54 orang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Menurunnya indeks resiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi bencana untuk wilayah diluar Kecamatan Tungkal Ilir (*respon time*).
2. Lambatnya informasi pengaduan kejadian bencana dari masyarakat yang diterima bagian layanan BPBD.
3. Tidak mudanya akses menuju lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Kurangnya sumber-sumber air digunakan untuk pemadaman.
5. Menjadi kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar.
6. Kurangnya frekuensi interaksi dan koordinasi antara BBD dengan kelompok masyarakat desa tangguh bencana.
7. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesiapsiagaan bencana.
8. Belum cukup sarana air "motor boat" untuk penanggulangan bencana banjir.

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Penanggulangan Bencana					Belum optimalnya kinerja dan pelayanan penanggulangan bencana
a. SDM b. Anggaran	23 PNS 64 TRC 14 TTK Ada (APBD/BNPB)	Jumlah Orang Rupiah	a. Kemampuan personil terbatas b. APBD	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat BNPB Dana Siap Pakai, APBN	
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Belum optimal		Jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan dengan masyarakat	Keterlibatan stakeholder dan kepedulian masyarakat terhadap bencana	Kurang optimalnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
Penguasaan Teknologi penanggulangan Bencana	Belum optimal	Unit	Pusat data dan informasi kebencanaan di BPBD	Ketersediaan software dan hardware pengolahan data dan informasi penanggulangan bencana	Belum tersedianya teknologi mutakhir kebencanaan
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Ada, belum lengkap	Jumlah kebutuhan sarpras	Markas Personil TRC-PB dan gudang penyimpanan peralatan	Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana	- Belum adanya markas TRC-PB milik BPBD - Belum tersedianya gudang logistik peralatan

					penanggulan gan bencana
Pengurangan Resiko Bencana (mitigasi)	Belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Jumlah aturan	Pembuatan RAD dan PRB	Peraturan Daerah RAD dan PRB	Belum optimalnya pelaksanaan RAD dan PRB
Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana)	Belum optimal	Jumlah rehab dan rekon	- SDM penghitungan kerusakan/kerugian dampak bencana - Rencana pemulihan pasca bencana	Bantuan rehab dan rekon	Belum optimalnya pemulihan rehab dan rekon pasca bencana
Perubahan Iklim /Global Warming	Sumber data yang tersedia	Data iklim	Terbatasnya pengetahuan tentang iklim/cuaca	Informasi potensi bencana dari BMKG	Kurangnya Informasi dini potensi bencana

3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2025–2030 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2045 dan berdasarkan masalah–masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025– 2030 sebagai berikut :

" BERKAH MADANI "

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis Serta Mandiri dan ber-Inovasi)

VISI :

" MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI "

- **Berkualitas**, Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

- **Ekonomi Maju**, Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- **Religius**, Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
- **Kompetitif**, Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- **Aman**, Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- **Harmonis**, Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonis bergama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama
- **Mandiri**, Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)..
- **Dan Ber-Inovasi** Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat

MISI :

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 3 (Tiga) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Berkah dalam Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Dari misi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat merumuskan isu strategis pelayanan OPD yang mendukung visi dan misi tersebut sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis serta mantap dan Inovatif

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis serta mantap dan inovatif menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk berktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak

hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Tujuan : Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan keempat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2045 dan RPJPD Provinsi Jambi 2025–2045, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2025 – 2029.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran : Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :

(diambil terkait sesuai tuisi BPBD)

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perlindungan social dan ketenagakerjaan
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta investasi
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik praktik inovasi yang baik secara kontinuo

Dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung yang dirumuskan ke dalam program strategis berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

Program : Program Penanggulangan Bencana

3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jambi

RENSTRA PROVINSI BELUM ADA

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW yang berkaitan dengan BPBD (kawasan resiko bencana)

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah mengenai Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), dan Pelayanan Publik di daerah.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan Renstra, agar Renstra yang disusun benar-benar berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga Renstra yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi BPB dan menjadi komitmen bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebutkan antara lain:

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan (S)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
- 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
- 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

B. Kelemahan (W)

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang (O)

- 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
- 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
- 4) Adanya peranserta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Ancaman (T)

- 1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;
- 2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal BPBD yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.

- 1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
- 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat.
- 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
- 5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi

2. Strategi W-O, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
- 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
- 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
- 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3. Strategi S-T, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
 - 2) Peningkatan informasi dini potensi bencana
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
4. Strategi W-T, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
- 1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana
 - 3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada telaah strategis dengan menggunakan instrumen matriks analisis SWOT berikut.

Tabel 3.2.
Matriks SWOT Faktor Internal dan Faktor Eksternal BPBD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Eksternal	Internal	<p><u>Kekuatan (strength)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB; 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan <u>Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN)</u>; 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana; 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat 	<p><u>Kelemahan (weakness)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana; 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.
	<p><u>Peluang (opportunity)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana; 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah); 4) Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana. 	<p><u>Asumsi Strategi (S-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat. 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana. 4) Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana 5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi 	<p><u>Asumsi Strategi (W-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

<u>Ancaman (<i>threat</i>)</u>	<u>Asumsi Strategi (S-T)</u>	<u>Asumsi Strategi (W-T)</u>
<p>1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;</p> <p>2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.</p>	<p>1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan</p> <p>2) Peningkatan informasi dini potensi bencana</p> <p>3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana</p>	<p>1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.</p> <p>2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana</p> <p>3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih periode 2025-2029

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin raih dari masing-masing misi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yaitu :

" BERKAHMADANI "

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis Mantap dan Inovatif)

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan **Visi** Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

" TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL "

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara professional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam

meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

4.1.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana ;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi, berkaitan dengan bidang kebencanaan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;

3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik;
4. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
7. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
8. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
9. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.
10. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terlindunginya masyarakat dari ancaman bencana	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	96%	95%	94%	93%	92%	91%

Tabel T-C-27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENSTRA BPBD (2025-2029)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Umur Kerjak at Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Peningkatan Kemampuan SDM yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana	Lancarnya administrasi perkantoran	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM : 61 RESPONDEN SKM : 86,38 % LHE : 78,61 % [BB]	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Yang Efisiensi dan Efektivitas		62 R	Rp 8,526,505,853	63 R	Rp 10,231,807,024	64 R	Rp 12,278,168,428	65 R	Rp 15,584,502,114	66 R	Rp 17,680,562,537	67 R	Rp 21,216,675,044	68 R	Rp 85,518,221,000	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen			Rp 55,586,925		Rp 66,704,310		Rp 80,045,172		Rp 96,054,206		Rp 115,265,048		Rp 138,318,057		Rp 551,973,718	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	18,866,925	8 dokumen	22,640,310	8 dokumen	27,168,372	8 dokumen	32,602,046	8 dokumen	39,122,456	8 dokumen	46,946,947	48 dokumen	187,347,056	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6,120,000	6 dokumen	7,344,000	6 dokumen	8,812,800	6 dokumen	10,575,360	6 dokumen	12,690,432	6 dokumen	15,228,518	36 dokumen	60,771,110	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6,120,000	6 dokumen	7,344,000	6 dokumen	8,812,800	6 dokumen	10,575,360	6 dokumen	12,690,432	6 dokumen	15,228,518	36 dokumen	60,771,110	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6,120,000	6 dokumen	7,344,000	6 dokumen	8,812,800	6 dokumen	10,575,360	6 dokumen	12,690,432	6 dokumen	15,228,518	36 dokumen	60,771,110	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	12 dokumen	6,120,000	6 dokumen	7,344,000	6 dokumen	8,812,800	6 dokumen	10,575,360	6 dokumen	12,690,432	6 dokumen	15,228,518	36 dokumen	60,771,110	BPBD Kab. Tanjung Barat	Kab. Tanjung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung Jawah	Lokasi
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6,120,000	12 Laporan	7,344,000	12 Laporan	8,812,800	12 Laporan	10,575,360	12 Laporan	12,690,432	12 Laporan	15,228,518	36 Laporan	60,771,110	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6,120,000	12 Laporan	7,344,000	12 Laporan	8,812,800	12 Laporan	10,575,360	12 Laporan	12,690,432	12 Laporan	15,228,518	36 Laporan	60,771,110	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	Laporan Keuangan Tahunan OPD yang tersusun			Rp 4,043,915,428		Rp 4,852,698,514		Rp 5,823,238,216		Rp 6,987,885,860		Rp 8,385,463,032		Rp 10,062,555,638		Rp40,155,756,687	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	02.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	Org/bulan	Rp 3,894,843,428	Org/bulan	4,673,812,114	Org/bulan	5,608,574,536	Org/bulan	6,730,289,444	Org/bulan	8,076,347,332	Org/bulan	9,691,616,799	Org/bulan	38,675,483,653	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya laporan keuangan	02.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139,755,000	12 Dokumen	167,706,000	12 Dokumen	201,247,200	12 Dokumen	241,496,640	12 Dokumen	289,795,968	12 Dokumen	347,755,162	70 Dokumen	1,387,755,970	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	02.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tertaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	12 laporan	4,658,500	12 laporan	5,590,200	12 laporan	6,708,240	12 laporan	8,049,888	12 laporan	9,659,866	12 laporan	11,591,839	36 laporan	46,258,532	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD	02.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Tertaksananya penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulan dan semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	4,658,500	4 laporan	5,590,200	4 laporan	6,708,240	4 laporan	8,049,888	4 laporan	9,659,866	4 laporan	11,591,839	24 laporan	46,258,532	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.03.	Administrasi Baarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Baarang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris			Rp 9,317,000		Rp 11,180,400		Rp 13,416,480		Rp 16,099,776		Rp 19,319,731		Rp 23,183,677		Rp92,517,065	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tertaksananya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,658,500	1 Dokumen	5,590,200	1 Dokumen	6,708,240	1 Dokumen	8,049,888	1 Dokumen	9,659,866	1 Dokumen	11,591,839	6 Dokumen	46,258,532	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laoran rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	4,658,500	1 laporan	5,590,200	1 laporan	6,708,240	1 laporan	8,049,888	1 laporan	9,659,866	1 laporan	11,591,839	6 laporan	46,258,532	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN			Rp 314,116,000		Rp 376,939,200		Rp 452,327,040		Rp 542,792,448		Rp 651,350,938		Rp 781,621,125		Rp3,119,146,751	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	292,820,000	100 Paket	351,384,000	100 Paket	421,660,800	100 Paket	505,992,960	100 Paket	607,191,552	100 Paket	728,629,862	501 Paket	2,907,679,174	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat untuk PNS	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 orang	21,296,000	4 orang	25,555,200	4 orang	30,666,240	4 orang	36,799,488	4 orang	44,159,386	4 orang	52,991,263	24 Orang	211,467,576	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 487,811,500		Rp 585,373,800		Rp 702,448,560		Rp 842,938,272		Rp 1,011,525,926		Rp 1,213,831,112		Rp4,843,929,170	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9,317,000	12 Paket	11,180,400	12 Paket	13,416,480	12 Paket	16,099,776	12 Paket	19,319,731	12 Paket	23,183,677	70 Paket	92,517,065	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	61,226,000	12 Paket	73,471,200	12 Paket	88,165,440	12 Paket	105,798,528	12 Paket	126,958,234	12 Paket	152,349,880	70 Paket	607,969,282	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan keuangan	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya rapat rutin SKPD dengan baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4,658,500	12 Paket	5,590,200	12 Paket	6,708,240	12 Paket	8,049,888	12 Paket	9,659,866	12 Paket	11,591,839	70 Paket	46,258,532	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan keuangan	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6,655,000	12 Paket	7,986,000	12 Paket	9,583,200	12 Paket	11,499,840	12 Paket	13,799,808	12 Paket	16,559,770	70 Paket	66,083,618	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan daya baca pegawai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,655,000	12 Dokumen	7,986,000	12 Dokumen	9,583,200	12 Dokumen	11,499,840	12 Dokumen	13,799,808	12 Dokumen	16,559,770	70 Dokumen	66,083,618	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	399,300,000	12 Laporan	479,160,000	12 Laporan	574,992,000	12 Laporan	689,990,400	12 Laporan	827,988,480	12 Laporan	993,586,176	70 Laporan	3,965,017,056	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung Jawah	Lokasi
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 260,876,000	Rp 313,051,200			Rp 375,661,440	Rp 1,301,493,728	Rp 540,952,474	Rp 649,142,968			Rp3,441,177,810		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit					0	-	11	850,700,000	0		0	-	11Unit	850,700,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	173,030,000	207,636,000	7 Unit	249,163,200	7 Unit	298,995,840	358,795,008	7 Unit	430,554,010	35 Unit	1,718,174,058		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	87,846,000	105,415,200	4 unit	126,498,240	4 unit	151,797,888	182,157,466	4 unit	218,588,959	24 bulan	872,303,752		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 2,265,459,500	Rp 2,718,551,400			Rp 3,262,261,680	Rp 3,914,714,016	Rp 4,697,656,819	Rp 5,637,188,183			Rp22,495,831,598		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya jasa surat menyurat materi dan benda pos lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	17,303,000	20,763,600	12 Laporan	24,916,320	12 Laporan	29,899,584	35,879,501	12 Laporan	43,055,401	70 Laporan	171,817,406		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	111,804,000	134,164,800	12 Laporan	160,997,760	12 Laporan	193,197,312	231,836,774	12 Laporan	278,204,129	70 Laporan	1,110,204,776		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66,550,000	79,860,000	12 Laporan	95,832,000	12 Laporan	114,998,400	137,998,080	12 Laporan	165,597,696	70 Laporan	660,836,176		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	2.08.0004	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya jasa kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,069,802,500	2,483,763,000	12 Laporan	2,980,515,600	12 Laporan	3,576,618,720	4,291,942,464	12 Laporan	5,150,330,957	70 Laporan	20,552,973,241		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	1,089,423,500	1,307,308,200	12 bulan	1,568,769,840	12 bulan	1,882,523,808	2,259,028,570	12 bulan	2,710,834,284	12 bulan	Rp10,817,888,201		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional perorangan atau kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 unit	25 unit	199,650,000	239,580,000	25 unit	287,496,000	25 unit	344,995,200	413,994,240	25 unit	496,793,088	125 unit	1,982,508,528		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	25 unit	332,750,000	25 unit	399,300,000	25 unit	479,160,000	25 unit	574,992,000	25 unit	689,990,400	25 unit	827,988,480	125 unit	3,304,180,880	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya dalam kondisi baik	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Meningkatnya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	199,650,000	7 unit	239,580,000	7 unit	287,496,000	7 unit	344,995,200	7 unit	413,994,240	7 unit	496,793,088	35 unit	1,982,508,528	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya rahabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya biaya pemeliharaan rahabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	304,133,500	1 unit	364,960,200	1 unit	437,952,240	1 unit	525,542,688	1 unit	630,651,226	1 unit	756,781,471	5 unit	3,020,021,324	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkat biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	53,240,000	2 unit	63,888,000	2 unit	76,665,600	2 unit	91,998,720	2 unit	110,398,464	2 unit	132,478,157	10 unit	528,668,941	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR																						
Mewujudkan kondisi sosial yang tertam, tertib dan harmonis	(Iku eselon II) Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Kabupaten	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	100%		Rp3,396,432,700	100%	Rp4,075,719,240	100%	Rp6,459,816,288	100%	Rp6,622,631,482	100%	Rp7,346,439,623	100%	Rp8,451,411,416	100%	Rp36,352,450,748	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Memberikan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Persentase ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten			Rp193,261,200		Rp231,913,440		Rp878,296,128		Rp333,955,354		Rp400,746,424		Rp480,895,709		Rp2,519,068,255	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Terpenuhnya pembuatan leaflet, brosur dan baliho didaerah rawan bencana	3.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 Orang	120 Orang	193,261,200	120 Orang	231,913,440	120 Orang	278,296,128	120 Orang	333,955,354	120 Orang	400,746,424	120 Orang	480,895,709	600 Orang	1,919,068,255	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Terpenuhnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen					1 Dokumen	600,000,000				-		-	1 Dokumen	600,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Mengurangi dampak resiko bencana.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten	2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Rp1,199,231,000		Rp1,439,077,200		Rp2,326,892,640		Rp2,375,866,944		Rp2,486,725,402		Rp2,984,070,482		Rp12,811,863,668		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana	Terpenuhnya Kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten	03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	131,769,000	1 Kegiatan	158,122,800	1 Kegiatan	189,747,360	1 Kegiatan	227,696,832	1 Kegiatan	273,236,198	1 Kegiatan	327,883,438	5 Kegiatan	1,308,455,628		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Terenuhnya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 unit	50 unit	159,720,000	50 unit	191,664,000	50 unit	229,996,800	50 unit	275,996,160	50 unit	331,195,392	50 unit	397,434,470	250 Unit	1,586,006,822		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terselenggaranya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terselenggaranya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	43,923,000	30 Orang	52,707,600	30 Orang	63,249,120	30 Orang	75,898,944	30 Orang	91,078,733	30 Orang	109,294,479	150 Orang	436,151,876		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terselenggaranya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terpenuhnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terselenggaranya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	10 Keluarga	43,923,000	10 Keluarga	52,707,600	10 Keluarga	63,249,120	10 Keluarga	75,898,944	10 Keluarga	91,078,733	10 Keluarga	109,294,479	60 Keluarga	436,151,876		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terselenggaranya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Terpenuhi penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terselenggaranya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	292,820,000	5 Kawasan	351,384,000	5 Kawasan	421,660,800	5 Kawasan	505,992,960	5 Kawasan	607,191,552	5 Kawasan	728,629,862	30 Kawasan	2,907,679,174		BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														UML Kerja Perangk at Daerah Penang gung gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	03.2.02.00021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	64 orang	64 orang	175,692,000	64 orang	210,830,400	64 orang	252,996,480	64 orang	303,595,776	64 orang	364,314,931	64 orang	437,177,917	320 orang	1,744,607,505	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Terpenuhiya dokumen penyusunan kontinjensi	03.2.02.00022	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen					1 dokumen	360,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	360,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Terlaksananya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	03.2.02.00023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen								1 Dokumen	303,595,776					1 Dokumen	303,595,776	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana terhadap bencana	Terlaksananya operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	03.2.02.00026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	12 Laporan	175,692,000	12 Laporan	210,830,400	12 Laporan	252,996,480	12 Laporan	303,595,776	12 Laporan	364,314,931	12 Laporan	437,177,917	60 Laporan	1,744,607,505	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Tersusunnya rencana penanggulangan bencana kabupaten	03.2.02.00027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	-			1 dokumen	240,000,000								1 Dokumen	240,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	03.2.02.00028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	175,692,000	5 Kawasan	210,830,400	5 Kawasan	252,996,480	5 Kawasan	303,595,776	5 Kawasan	364,314,931	5 Kawasan	437,177,917	25 Kawasan	1,744,607,505	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Rp1,194,027,000	Rp1,432,832,400	Rp1,719,398,880	Rp2,063,278,656	Rp2,779,531,163	Rp2,971,121,265	Rp12,160,189,364							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Warga Masyarakat yang terdampak bencana non alam epidemik/wabah penyakit yang dibantu	03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	219,615,000	263,538,000	316,245,600	379,494,720	455,393,664	546,472,397	2,180,759,381							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Pengangan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Terlaksananya pemantauan, dan penanganan penyelamatan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat	03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Pengangan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	12 Dokumen	215,742,000	258,890,400	310,668,480	372,802,176	447,362,611	536,835,133	2,142,300,801							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Terlaksananya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	50 Orang	216,953,000	260,343,600	312,412,320	374,894,784	449,873,741	539,848,489	2,154,325,934							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	43,923,000	52,707,600	63,249,120	75,898,944	91,078,733	109,294,479	436,151,876							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Terlaksananya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	100 Orang	100 Orang	219,615,000	263,538,000	316,245,600	379,494,720	455,393,664	546,472,397	2,180,759,381							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	131,769,000	158,122,800	189,747,360	227,696,832	273,236,198	327,883,438	1,308,455,628							BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UML Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Terpenuhi Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3 Dokumen									3 Dokumen	303,596,776			3 Dokumen	303,596,776	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	146,410,000	3 Laporan	175,692,000	3 Laporan	210,830,400	3 Laporan	252,996,480	3 Laporan	303,595,776	3 Laporan	364,314,931	15 Laporan	1,453,839,587	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Mewujudkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulanga	2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	Rp809,913,500		Rp971,896,200		Rp1,535,228,640		Rp1,849,530,528	-	Rp1,679,436,634	-	Rp2,015,323,960		Rp8,861,329,462	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Terselenggaranya efektivitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	450,000,000					1 Dokumen	450,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Tersedianya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulanga	2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen					5 Dokumen	368,953,200							5 Dokumen	368,953,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Terpenuhi Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	100 Orang	218,284,000	100 Orang	261,940,800	100 Orang	314,328,960	100 Orang	377,194,752	100 Orang	452,633,702	100 Orang	543,160,443	500 Orang	2,167,542,657	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UML Kerja Perangk at Daerah Penang gung Jawab	Lokasi							
							Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Tersedianya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	2.04.0010	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	256,217,500	1 Kegiatan	307,461,000	1 Kegiatan	368,953,200	1 Kegiatan	442,743,840	1 Kegiatan	531,292,608	1 Kegiatan	637,551,130	6 Kegiatan	2,544,219,278	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat					
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	167,706,000	1 Dokumen	201,247,200	1 Dokumen	241,496,640	1 Dokumen	289,795,968	1 Dokumen	347,755,162	1 Dokumen	417,306,194	6 Dokumen	1,665,307,164	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat					
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	167,706,000	1 Dokumen	201,247,200	1 Dokumen	241,496,640	1 Dokumen	289,795,968	1 Dokumen	347,755,162	1 Dokumen	417,306,194	6 Dokumen	1,665,307,164	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat					
JUMLAH								Rp	11,922,938,553	Rp	14,307,526,264	100%	Rp	18,737,984,716	100%	Rp	22,207,133,596	100%	Rp	25,027,002,160	100%	Rp	29,668,086,460	100%	Rp	121,870,671,748	

N/B-Kapmendagri Nomor:900.1.2850
TA.2025

Kuala Tungkal, 20 Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penganggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



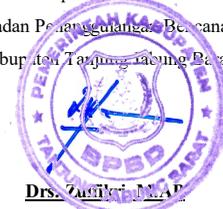
NIP.1960192019911031003

Tabel T-VI.C.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian dan Proyeksi										Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Standar IKK (PP 6/2008)																			
1.	SPM BENCANA																			
	a) Indeks resiko bencana kabupaten	156		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36%	92,75 %	92,75 %	93.82%	90.35%		
	b) Jumlah jenis potensi bencana kabupaten	5		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36%	92,75 %	92,75 %	93.82%	90.35%		
	Kejadian									28 Kali	75 Kali	131 Kali	124 Kali	29 kali	37 Kali	18 Kali	61 Kali	42 Kali		

Kuala Tungkal, 20 Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfari, M.A.P.

NIP.19660528 199103 1 003

12		
250,000.00		
		12
3,000,000.00		500,000.00
4		
12,000,000.00		6,000,000.00

92,070,000.00
16,050,000.00
76,020,000.00

RENSTRA	10
RENJA	10
LAPORAN KINERJA	10
SAKIP	10
LAKIP	10
LAPORAN EVALUASI JABATAN ASN	10
PRA RKA DAN RKA	10
LAPORAN KEUANGAN	10

6	72
---	----

Pakaian dinas harian PDH	38
Pakaian kerja lapangan Satgas TRC	66

104

66	12	792
66	12	792

145
5

5

99,983,015

10%

89,984,714

14	250,000	275,000	50
7	130,000	198,000	6
	130,000	198,000	
98	180,000	198,000	300

690,000 869,000

690,000 869,000

-

-

70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
70,000.00	700,000.00	
	5,600,000.00	
275,000.00	19,800,000.00	
	25,400,000.00	
375,000.00	14,250,000.00	
2,552,000.00	168,432,000.00	
	182,682,000.00	
		500,000.00
		75,000.00
200,000.00	158,400,000.00	125,000.00
150,000.00	118,800,000.00	750,000.00
350,000.00	277,200,000.00	130,000.00
		100,000.00
		100,000.00
		35,000.00
		100,000.00
		150,000.00
		160,000.00

155,000.00
105,000.00
67,000.00
2,552,000.00

55

11

9,998,302

109,981,317

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana, sangat diperlukan suatu rencana strategis penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Strategi yang akan dilaksanakan

- 1) Menyediakan Sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana;
- 2) Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana
- 3) Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB;
- 4) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- 5) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten;

5.1.2 Kebijakan yang akan dilaksanakan

- 1) Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana
- 2) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan;
- 4) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana;
- 5) Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten
- 6) Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
- 7) Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel T-C..26.1

**Strategi “ Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

VISI : “ Terwujudnya layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Profesional “			
MISI 1 : Mewujudkan Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi social yang tenteram,tertib,mantap dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	- Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana	1. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang- uandangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana	- Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana - Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik. - Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana		
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana	- Terwujudnya desa siaga bencana	- Menyediakan sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana	1. Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana

			2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	- Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB	1. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan.
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat	- Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana - Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	-	-
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.	- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah	- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	1. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta berkaitan dengan bidang kebencanaan	- Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan	- Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten	1. Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten. 2. Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta

			akuntabel.
--	--	--	------------

Tabel V.26.2

Strategi “ TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI”

Tanjung Jabung Barat yang “Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi”

VISI : “ Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi			
MISI 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Tentram, Tertib, Inovatif dan Memiliki Daya Tahan Sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan system peringatan dini (Early Warning System)	Peningkatan Kapasitas Monitoring dan Pemantauan Potensi Bencana
		Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor	1. Penyusunan Rencana Kontijensi Terpadu Lintas Sektor 2. Penguatan Forum Koordinasi Penanggulangan Bencana

BAB VI

RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana strategis Perubahan merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program sesuai RPJMD 2021-2026 berupa program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Program utama ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan program pendukung (generik) digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program, karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Utama (teknis)

Program Penanggulangan Bencana (1.05.03)

Kegiatan (1.05.03.2.01):

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan (1.05.03.2.01.):

(01) Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)

(02) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota

Kegiatan (1.05.03.2.02.):

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.02.):

(01) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

(02) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- (03) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- (04) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- (05) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- (06) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- (07) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
- (08) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- (09) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- (10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- (11) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.03..) :

- (01) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- (02) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- (03) Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- (04) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
- (05) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota
- (06) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- (07) Respon Cepat Bencana Alam Epidemik/Wabah Penyakit
- (08) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan (1.05.03.2.04.) :

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan (1.05.03.2.04.):

- (01) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- (02) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- (03) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/kota
- (04) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- (05) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)Kab/Kota
- (06) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

II. Program Pendukung (generik)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (1.05.01).

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja erangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.01.) :

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rekening Kegiatan (1.05.01.2.02.) :

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.03.) :
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Rekening Kegiatan (1.05,01.2.04)
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.05.) :
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.06.) :
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.07.) :
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.08.) :
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.09.) :
- 10) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya
Rekening Kegiatan (1.05.01.2.11):

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran.

Tabel T-C.27 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 240115-1350 TAHUN 2024

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan Penanggulangan Bencana									
1.1	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Persen	100	96 %	95 %	94 %	93 %	92 %	91 %	100 %
1.2	Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten	Jenis Bencana	5	5	5	5	5	5	5	5

Tabel VI.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DI EXCEL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang urusan mempunyai indikator kinerja individu (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

Untuk lebih rinci uraian indikator kinerja individu (IKI) beserta kinerja, indikator kinerja dan penjelasan formulasi perhitungan capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sbb:

1. Indikator Kinerja Individu Kepala Pelaksana
2. Indikator Kinerja Individu Sekretasi
3. Indikator Kinerja Individu Kabid Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana
4. Indikator Kinerja Individu Kabid Bencana dan Rehabilitasi
5. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Kepegawaian dan Umum
6. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Keuangan
8. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Kesiapsiagaan
10. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Sarana dan Prasarana
11. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2. TUGAS : Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
 - 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
 - 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
 - 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten	1. Cakupan Penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana di kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Bencana dan Rehabilitasi
	2. Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana WMK (Wilayah Manajemen Kebencanaan)	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang data direhab}}{\text{Jumlah seluruh kerusakan sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Bidang Kesiapsiagaan Sarana dan Prasaran
	3. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun yang direncanakan}} \times 100\%$	Bidang Srekrariat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
3. FUNGSI :
 - 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program rencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
 - 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
 - 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Instansi dan SDM Kebencanaan.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen yang direncanakan ; <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. ➤ Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➤ Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah ➤ Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Bidang Srekrariat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

2. TUGAS : Membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD.
3. FUNGSI : 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran.	Jumlah Dokumen Perencanaan ; ➤ Jumlah Dokumen Renstra ➤ Jumlah Dokumen Renja ➤ Jumlah Dokumen RKA ➤ Jumlah Dokumen DPA ➤ Jumlah Dokumen LAKIP ➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD ➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD ➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD ➤ Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra ➤ Jumlah dokumen evaluasi Renja	Jumlah dokumen yang disusun ; ➤ Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen Renja yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen RKA yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen DPA yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renstra yang tersusun ➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renja yang tersusun	Subbag Monev

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2. TUGAS : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
 - 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
 - 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Laporan Keuangan Tahunan OPD : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun OPD ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan ➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan ➤ Jumlah Laporan Semesteran 	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun OPD tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan tersusun ➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan tersusun ➤ Jumlah Laporan Semesteran tersusun 	Subbag Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2. TUGAS : Melakukan, surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
 - 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;

- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1. Jumlah Kartu Inventaris 2. Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN 3. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Cakupan Laporan Administrasi yang tersusun ; 1. Jumlah Laporan Kartu Inventaris 2. Persentase Laporan Kehadiran Pegawai/ ASN 3. Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbag Kepegawaian dan Umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG KESIAPSIAGAAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.
3. FUNGSI : 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤ Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana
➤ Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KESIAPSIAGAAN
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.
3. FUNGSI :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 4) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - 5) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
 - 6) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 7) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
 - 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- 1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
- 2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.
- 3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
 - 2) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
 - 3) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
 - 4) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- 1. JABATAN : KEPALA BIDANG BENCANA DAN REHABILITASI

2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.
3. FUNGSI : 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<p>➤Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.</p> <p>➤Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	<p>1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>2. Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	<p>- Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Jumlah kejadian bencana Kabupaten</p> <p>- Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban</p> <p>- Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusun</p>	Kabid Bencana dan Rehabilitasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.
3. FUNGSI :
 - 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan subbid;
 - 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
 - 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
 - 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.	1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD}}{\text{Jumlah kejadian bencana Kabupaten}} \times 100\%$ <p>- Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban</p>	Kabid Bencana dan Rehabilitasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.
3. FUNGSI : 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan subbid;
 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusu	Kabid Bencana dan Rehabilitasi

CASCADING

VISI: Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat “BERKAH MADANI”

MISI 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	(iku eselon II) Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Desa
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Dokumen PRB
							Pelatihan Pencegahan dan	Jumlah Desa

							Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	
							Pengendali an Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga an terhadap Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Frekuensi
							Penyediaan Peralatan Perlindung an dan Kesiapsiaga an terhadap Bencana	Jumlah peralatan Perlindunga n dan Kesiapsiaga an terhadap Bencana
							Pengelolaa n Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen yang dikelola Pusdatin Kabupaten
							Penangana n Pascabenc	Persentase korban yang memperoleh

							ana Kabupaten /Kota	pelayanan
							Pengemba ngan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah satgas TRC
							Penyusuna n Rencana Kontijensi	Dokumen Kontijensi
					Pelayanan Penyelama tan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Persentase penyelamat an jiwa/harta dan lingkungan
							Pencarian, Pertolonga n dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Persentase korban yang dievakuasi
							Penyediaan Logistik Penyelama tan dan	Persentase penyediaan logistik korban

							Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	bencana
							Ativasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Koordinasi Penanganan Darurat Bencana
							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Persentase Korban Bencana yang dibantu
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Regulasi

**VISI MISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2025-2029**

RPJMD tahap I ditujukan untuk penguatan pondasi pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, Dan Berkelanjutan (Visi RPJPD 2025-2045).

Kab. Tanjung Jabung Barat yang maju dan sejahtera ditandai standar hidup penduduknya yang relatif tinggi dan makmur, ditambah dengan kemajuan teknologi serta pertumbuhan ekonomi meningkat.

Target Hingga Akhir Periode 2029/2030

- Pertumbuhan Ekonomi (%) mencapai 5 persen
- Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,78
- Angka kemiskinan menurun hingga 8 persen
- Indeks Gini menurun hingga 0,287

KERANGKA VISI/MISI KEPALA DAERAH

VISI ;

“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

BERKAH ;

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)

MADANI ;

(Mandiri dan ber-Inovasi)

MISI ;

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;

2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

MISI 1 Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.

Sasaran :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan
- Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban serta investasi
- Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik praktik inovasi yang baik secara kontinu

Arah pembangunan :

- Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjangkau bagi masyarakat
- Pendidikan yang berkualitas dan merata
- Perlindungan Sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan
- Ketenteraman dan ketertiban daerah tangguh
- Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
- Keluarga berkualitas, Kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Arah kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air

minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;

- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian
- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri.
- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
- Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)..

- Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
- Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
- Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
- Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)

- Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi.
- Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan.
- Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja
- Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas
- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
- penataan kawasan kumuh perkotaan
- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan

perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
- Penetapan upah kabupaten berbasis produktivitas dan berkeadilan
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Prioritas pembangunan :

- Pembangunan pemuda

Program Prioritas :

- Program Bapak Angkat Stunting melalui CSR

Operasional (Kebijakan/Rencana/Program) :

- Pemberian honorarium bagi Da'I, guru ngaji, pengurus masjid, guru pondok, aparat desa, pengurus adat, serta kelurahan.
- Bantuan Sepeda Motor untuk Da'i Desa.
- Bantuan Rumah Ibadah
- Bantuan Pondok Pesantren
- Program Rumah Ibadah Paripurna.
- Perbaikan Fasilitas Pendidikan;
- Peningkatan Kesejahteraan kepada Guru PAUD
- Pemberian Beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi
- Janji politik

- Peningkatan Fasilitas pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas sampai ke PUSTU, dan Perlindungan Kesehatan.

- Penyediaan tempat pemakaman non muslim
- Janji politik lainnya

MISI 2 Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Arah Pembangunan :

- Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
- Digitalisasi diberbagai sektor

Arah kebijakan :

- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu:
 - (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
 - (ii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
- Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah
- Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
- Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- Terwujudnya integrasi data kependudukan
- Penguatan integritas partai politik.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
- Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.

- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
- Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Prioritas pembangunan :

- Peningkatan kualitas dan konsistensi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
- Peningkatan kinerja perencanaan dan penganggaran
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program Prioritas :

- Reformasi birokrasi >>> Transformasi birokrasi
- Inovasi pelayanan publik

Operasional Kebijakan/Rencana/Program :

- Optimalisasi implementasi SIPD
- Infrastruktur teknologi informasi
- Janji politik lainnya

MISI 3 Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan

Sasaran :

- Meningkatnya produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi industri berbasis SDA.
- Meningkatnya ketangguhan sosial budaya dan ekologi

- Menurunnya ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan

Arah pembangunan :

- Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- Penerapan ekonomi hijau daerah
- Konektivitas ekonomi domestik dengan daerah luar
- Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- Stabilitas ekonomi daerah
- Lingkungan hidup berkualitas
- Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
- Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas
- Pemerataan pembangunan
- Pelabuhan pengumpan dan pelabuhan lainnya dengan kapasitas memadai
- Jaringan transportasi darat dan laut terintegrasi

Arah kebijakan :

- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna
- Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.

- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
- Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya
- Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang

layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.

- Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.
- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
- Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
- City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
- Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan parstisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan.
- Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga

- Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi
- Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan
- Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
- Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- Penerapan ekonomi hijau dan biru
- Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
- Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
- Penyediaan angkutan massal
- Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
- Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Penguatan infrastruktur teknologi
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber

- daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
 - Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM
 - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
 - Peningkatan produktivitas BUMD.
 - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
 - Hilirisasi sumberdaya alam unggulan
 - Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri
 - Penguatan ekosistem Industrialisasi
 - Penguatan pengendalian inflasi daerah.
 - Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
 - Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
 - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
 - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
- Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
- Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
- Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
- Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik
- Peningkatan sarana prasarana perhubungan
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.

- Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

Prioritas pembangunan :

- Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- Pemerataan pembangunan dari desa ke kota.
- Ekonomi kreatif dan kepemudaan
- Peningkatan pariwisata
- Peningkatan kualitas dan pelayanan air bersih
- Konektivitas antar desa/kecamatan/kabupaten
- Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Program Prioritas :

- KURDA
- Pemuda Entrepreneur (Pelatihan Kewirausahaan)
- Mengakomodir 1 usulan prioritas Musrenbang Desa/kelurahan per desa/kelurahan.
- Kerjasama KONI dan CSR dalam peningkatan atlet.
- Penanganan persampahan di kecamatan bersama perusahaan (CSR)
- Cetak sawah

Operasional (Kebijakan/Rencana/Program) :

- Mitigasi bencana
- Pengembangan peternakan
- Peningkatan perkebunan
- Perikanan budidaya
- Peningkatan industri kecil dan hilirisasi
- UMKM berbasis pondok pesantren
- Pelatihan dan Bantuan peralatan produksi untuk masyarakat/UMKM

- Pemuda/Pemudi di dalam perencanaan partisipatif
- Festival religi
- Pembangunan *Youth Centre* (pusat kegiatan pemuda /balai pemuda / gelanggang remaja).
- Peningkatan/ pembangunan Jalan lingkungan/ Pemukiman dan Tata Kota Ibukota Kecamatan
- Peningkatan/pembangunan Halte Sungai
- Peingkatan/pembangunan Jembatan
- Peningkatan/pembangunan tanggul dan Normalisasi Parit.
- Penanganan dan pengelolaan sampah di seluruh kecamatan.
- Pengelolaan resiko bencana
- Tempat pembuangan sampah (TPS) yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R)
- Pembentukan rumah inovasi
- Penambahan jumlah excavtor amphi
- Janji politik lainnya

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang memberi arah kebijakan yang lebih konkrit bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2025-2029, Sesuai dengan Kepmendagri Nomor : 900.1.2850 Tahun 2025

Keberhasilan penyusunan Renstra Perubahan SKPD Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi dan komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Diharapkan juga dengan telah disusunnya Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) dapat menjadi acuan bagi masing-masing bidang dalam merencanakan program tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Kuala Tungkal, Agustus 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP
NIP.19660528 199103 1 003

